Journal of Feminism and Gender Studies
Volume (3) Nomor 1: Januari-Juli 2023
Halaman 1-18
URL: https://jurnal.unej.ac.id/index.php/FGS/index

The Resistance of Adivasi Adhikar Samiti (AAS) Againts Forest Development Corporation (FDC) in Chhattisgarh India

Bella Yulidiningrum, Pra Adi Soelistijono
Universitas Jember
notoleb24@gmail.com

Abstract

Chhattisgarh is a state in India which separated from the state of Madhya Pradesh in 2000. One part of Chhattisgarh is Koriya District which is located in the northwest corner. The district is one of the most densely forested areas in Chhattisgarh. The prevalence of deforestation and forest conversion is a fundamental problem in India which has caused resistance from various groups in society, especially the Koriya community, who live based on the forest. One of the organizations against illegal logging is Adivasi Adhikar Samiti (AAS), an Indigenous Peoples Rights Organization that focuses on health. Using the concept of eco-feminism, this study will analyze the reasons why AAS plays a role in dealing with the problems of forest conversion and illegal logging in Chhattisgarh.

Keywords: *India, Forest Development Corporation (FDC), Adivasi Adhikar Samiti (AAS), Deforestation, Eco Feminism*

PENDAHULUAN

Chhattisgarh merupakan sebuah negara bagian di India yang memisahkan diri dari negara bagian Madhya Pradesh pada tahun 2000. Salah satu bagian dari Chhattisgarh adalah Distrik Koriya yang terletak di sudut barat laut. Distrik tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki hutan terpadat di Chhattisgarh, dengan tutupan hutan mencapai 62% dari total wilayah[1]. Dalam Sensus 2011, populasi distrik Koriya diperkirakan 658.917[2] yang mana 69% populasi di distrik tersebut tinggal di daerah pedesaan. Distrik ini dibagi menjadi lima unit atau blok administrasi: Manendragarh, Bharatpur, Sonhat, Khadgawan, dan Baikunthpur. Sekitar 46% dari populasi adalah *Scheduled Tribes* (yaitu, orang-orang yang termasuk dalam berbagai komunitas adat, termasuk Gond, Cherwas, Pandos, Agarias, Oraons, dan Baigas).

Masyarakat adat di Koriya bergantung pada hutan untuk sebagian besar mata pencaharianya. Hutan yang mencakup sekitar dua pertiga wilayah geografis Koriya menjadi pusat kehidupan dan kelangsungan hidup masyarakat adat. Hasil hutan seperti sayuran, jamur liar, buah-buahan, kacang-kacangan, dan umbi-umbian merupakan sumber penting ketahanan pangan dan nutrisi bagi orang-orang yang tinggal di dekat dan di dalam hutan. Perempuan adat menggunakan hasil hutan tersebut untuk memberi makan keluarga mereka. Oleh karena itu, seperti di kebanyakan wilayah adat, hutan memberikan ketahanan yang lebih besar kepada masyarakat adat sementara kerusakannya mengarah

[1] "Forest Survey of India (FSI)," 2011, 115, http://fsi.nic.in/cover_2011/chattisgarh.pdf.

[2] "Directorate of Economics & Statistics Chhattisgarh," 5AD, 14, http://www.mahaforest.gov.in/managementpdf/1441448415volume%20-I.Pdf.

pada pemiskinan dan migrasi untuk komunitas tersebut.[3] Hutan juga merupakan pusat tradisi spiritual dan budaya masyarakat adat.

Dengan proporsi penduduk adat yang tinggi dan ketergantunganya terhadap hutan, Koriya dan Chhattisgarh menjadi salahsatu dari lima daerah yang berada di bawah Pasal 244 Konstitusi India yang kemudian disebut sebagai *scheduled area*.[4] Dengan statusnya sebagai *scheduled area*, Chhattisgarh dilindungi oleh undang-undang yang berisi ketentuan khusus yang dimaksudkan untuk melindungi dan memberi manfaat bagi masyarakat adat yang tinggal di suatu daerah. Namun demikian, gagasan tentang hak-hak masyarakat adat ini bertentangan dengan eksploitasi komersial air dan hutan yang terjadi di India dalam beberapa tahun terakhir.

Di distrik Koriya, terdapat rencana alih guna hutan seluas 11.093 hektar yang terdiri dari hutan alam dan hutan campuran di bawah otoritas *Forest Development Corporations* (FDCs)[5]. FDC merupakan sebuah perusahaan yang didirikan di sebagian besar negara bagian di India dengan tujuan untuk melakukan kegiatan komersial berbasis hutan dengan fungsi yang berbeda di setiap negara bagian[6]. FDC Chhattisgarh dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas hutan. Salah satu strategi untuk meningkatkan produksi adalah mengganti pohon alami yang tumbuh lambat seperti sal dengan spesies yang tumbuh lebih cepat dan dianggap memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi seperti jati. Keuntungan yang diperoleh FDC sebagian digunakan untuk membayar dividen kepada pemerintah negara bagian. FDC dapat menghasilkan pendapatan yang sangat signifikan dengan memotong dan menjual beberapa hutan alam terbaik di India. Selama bertahun-tahun, telah banyak hutan yang diserahkan oleh berbagai negara bagian kepada FDC[7]. Diperkirakan 60 persen dari total kayu India diproduksi dan dipanen oleh FDC.[8]

Pada tahun 2005, Adivasi Adhikar Samiti (AAS) (Organisasi Hak-Hak Masyarakat Adat) terbentuk. Terbentuknya AAS merupakan wujud kekhawatiran dari Mitanin, sebuah organisasi bentukan pemerintah yang memiliki fungsi utama untuk fokus pada urusan kesehatan yang melihat program FDC akan berdampak langsung pada kesehatan. Pada awal pembentukanya, AAS terlibat dalam berbagai perjuangan, tidak hanya untuk hak kesehatan tetapi untuk hak makanan, kesetaraan gender, hak kerja dan pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan lokal, hak atas informasi, dan melawan kekerasan

[3] "High Level Committee on Socio-Economic, Health and Educational Status of Tribal Communities of India (HLC)," 2014, https://ruralindiaonline.org/resources/report-of-the-high-level-committee-on-socio-economichealth-and-educational-status-of-the-tribals-of-india/.

[4] "Ministry of Tribe Affairs (MoTA)," 2017, https://tribal.nic.in/declarationof5thSchedule.aspx.

[5] "Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam (CRVVN)," 2004, 19, http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/comp_data2312.pdf.

[6] "Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE)," 2010, http://www.icfre.org/FSRI-REPORT_English.pdf.

[7] Deshpande, "The Problem of Culture," 2004, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000944550404000208.

[8] "Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE)," 130.

dalam rumah tangga.[9] Dalam perkembanganya AAS kemudian menjadi basis bagi organisasi berbasis perempuan dan kemudian mengambil tindakan di Koriya untuk melindungi hutan alam tempat mereka dan keluarga mereka serta masyarakat bergantung.

Pada awal Januari 2006, AAS yang masih dalam masa pembentukanya melakukan perlawanan terhadap Forest Development Corporation of Chhattisgarh (FDCC) yang saat itu telah mulai menebang sejumlah wilayah hutan alam di Koriya. AAS beranggapan apabila hutan sangat penting bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat adat, sehingga, penting untuk tidak mengkomersialkan sumber daya alam. Maka dari itu formula untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan harus ditemukan di mana perempuan mendapatkan suara lebih besar dan kontrol atas keputusan tentang penggunaan sumber daya alam, dan proyek pengembangan sumber daya skala besar. Beberapa strategi kemudian dilakukan memantau dan menolak kegiatan penebangan pohon di distrik Koriya.

Penelitian ini menjadi menarik setidaknya dikarenakan oleh dua hal. Pertama keterlibatan AAS dalam memberantas penebangan hutan merupakan fenomena yang menarik mengingat AAS pada dasarnya merupakan organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Kedua, perlawanan AAS menarik karena memperlihatkan intreseksi antara perlawanan berbasis identitas sebagai masyarakat adat dan gender. Oleh karena alasan tersebut penulis akan menganalisis perlawanan AAS dalam tulisan yang berjudul Perlawanan Adivasi Adhikar Samiti terhadap Penebangan Hutan oleh Forest Development Corporations di Chhattisgarh India

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang dilakukan dan digunakan oleh penulis pada karya tulis ini adalah data sekunder (*Secondary Data*). Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan pihak lain dan bukan dengan pengamatan secara langsung. Hal ini membuat penulis tidak berinteraksi secara langsung dengan objek yang akan diteliti. Metode ini dapat disebut sebagai studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data yang valid maka penulis menggunakan data dari Perpustakaan Universitas Jember dan Ruang Baca Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dengan membaca berbagai macam literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Literature tersebut berupa media cetak, internet, jurnal, laporan, buku, dan buku elektronik (*e-book*). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif. Metode ini berfokus pada suatu masalah sehingga prosesnya tidak hanya sekedar mengumpulkan dan mengolah data. Penulis dituntut untuk dapat meneliti, menganalisis, mengintepretasikan, menjelaskan serta membuat kesimpulan masalah suatu fenomena. Hal ini dilakukan agar penulis dapat menyusun karya ilmiah secara sistematis sehingga isi dari karya ilmiah yang dibuatnya dapat dipahami dan bermanfaat.

KERANGKA KONSEPTUAL

Pada penulisan karya tulis ilmiah khususnya skripsi, kerangka konseptual dan teori dibutuhkan untuk dijadikan sebagai instrument yang dibutuhkan penulis untuk menganalisis dan melakukan penelitian. Hasilnya penulis dapat memberikan jawaban yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Sedangkan, teori adalah suatu

[9] Sulakshana Nandi and Helen Schneider, "Addressing the Social Determinants of Health: A Case Study from the Mitanin (Community Health Worker) Programme in India," *Health Policy and Planning* 29, no. suppl_2 (September 1, 2014): 22, https://doi.org/10.1093/heapol/czu074.

himpunan pengertian yang saling berkaitan, batasan, dan proporsi yang menyajikan pandangan sistematis tentang gejala-gejala dengan jalan menetapkan hubungan yang ada di antara variabel-variabel, dan dengan tujuan untuk menjelaskan gejala-gejala tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Konsep *Eco-Feminism, Human Security* dan Gerakan Sosial.

Konsep *Eco-Feminism*

Ekofeminisme, seperti halnya gerakan sosial lainya, merupakan sebuah aktivisme politik dan kritik intelektual. Menyatukan feminisme dan lingkungan, ekofeminisme berpendapat bahwa dominasi perempuan dan degradasi lingkungan adalah konsekuensi dari patriarki dan kapitalisme. Strategi apapun untuk mengatasi suatu persoalan harus memperhitungkan dampaknya pada yang lain sehingga tujuan feminisme tidak boleh dicapai dengan mengorbankan lingkungan yang semakin memburuk, dan perbaikan lingkungan seharusnya tidak diperoleh dengan mengorbankan perempuan[10].

Keterkaitan feminisme dengan isu-isu dan keprihatinan lingkungan yang mencakup baik teori sosial, ekologi maupun aktivisme politik yang berakar pada kebangkitan aktivisme lingkungan dan feminis telah mengembalikan aktivitas intelektual pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Ekofeminisme, feminisme lingkungan, dan feminis ekologi politik semuanya merujuk pada hubungan manusia, *gender*, budaya, lingkungan dan alam dengan melalui berbagai penekanan dan kerangka kerja[11];[12];[13].

Sejak 1980-an, keprihatinan para aktivis terfokus pada perang nuklir, polusi limbah beracun, dan deforestasi. Karya-karya ekofeminis, yang berupa teks akademik, populer, dan sastra, menekankan bahwa perempuan baik secara biologis dan sosial terkait dengan alam. Status dan subordinasi perempuan terkait dengan degradasi dan perubahan lingkungan sehingga penindasan dan degradasi alam dan lingkungan sejajar dengan penindasan dan degradasi perempuan[14]. Namun demikian, ketika dilihat dari perspektif internasional, persepsi *gender* tentang alam serta materi *gender* dan hubungan sosiokultural dengan lingkungan bervariasi menurut tempat, waktu dan budaya. Di banyak masyarakat di seluruh dunia, para ilmuwan sosial telah mendokumentasikan dan menjelaskan bagaimana perubahan kosmologi dan sejarah geografis membangun dan mereproduksi biner kunci: pria/wanita; budaya/alam; diri/lainnya.

Perempuan umumnya, walaupun tidak harus, terkait dengan alam dan kesuburan bumi dengan sifat kepasifan dan perasaan[15],[16]. Metafora budaya ini membentuk kehidupan

---

[10] Susan Buckingham, *Ecofeminism* (Amsterdam: Elsevier, 2015), 846.

[11] Carolyn Merchant, *The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution* (San Francisco: Harper & Row, 1980).

[12] Val Plumwood, *Feminism and the Mastery of Nature* (Australia: Routledge, 1994), https://www.routledge.com/Feminism-and-the-Mastery-of-Nature/Plumwood/p/book/9780415068109.

[13] Dianne Rocheleau, Barbara Thomas Slayter, and Esther Wangari, *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experience* (London: Routledge, 1996).

[14] Merchant, *The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution*.

[15] Merchant.

[16] Annette Kolodny, *The Land Before Her* (United States, 1984).

individu serta wacana publik misalnya melalui penggambaran Ibu Pertiwi. Pekerjaan ekofeminis awal memberikan wawasan tentang cara-cara di mana alam dan lingkungan dikaitkan dengan *gender*, dan kemudian menggunakan wawasan ini untuk menganalisis transformasi lingkungan atau merayakan hubungan dalam dimensi spiritualnya. Seperti halnya pemikiran induknya, ekofeminis mendefinisikan maskulinitas dan femininitas sebagai kategori yang dikonstruksi secara sosial yang merugikan manusia dan lingkungan dan terkait dengan proses sosial yang lebih besar seperti kolonialisme dan pembangunan[17].

Ekofeminisme dalam perkembanganya sadar untuk menyelaraskan manusia dan alam dalam suatu gerakan yang melampaui dualisme biner. Dalam kritik postruktural feminis, maskulinitas dan femininitas sebagai mode identitas diperiksa dalam kaitannya dengan penyimpanan pengetahuan kita tentang hubungan manusia dengan alam dan cara-cara di mana alam dan lingkungan dibuat berdasarkan *gender* dan dibangun secara sosial. Ekofeminisme menolak dualisme dari sifat manusia dan menekankan keanekaragaman dan interkoneksi yang kompleks antara ekologi, masyarakat, dan politik dalam pertanyaan tentang perubahan lingkungan baik jangka waktu pendek dan jangka panjang.

Ekofeminisme juga memberikan perhatian terhadap perkembangan ekonomi arus utama dan modernisasi pada skala internasional. Para pemikir ekofominis mengungkapkan bagaimana perempuan tidak terlibat dalam inisiatif modernisasi serta dalam teori dan kebijakan pembangunan. Sebagai contoh, mayoritas wanita di Afrika sub-Sahara adalah produsen makanan yang bertanggung jawab atas penyediaan rumah tangga mereka. Namun, di seluruh Afrika dan di tempat lain, perempuan, dan masih, tidak dapat memperoleh akses ke sumber daya sosial, keuangan, teknis, dan alam. Ketika perempuan dimasukkan perlahan-lahan dan tidak merata ke dalam proyek modernis melalui program-program pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk dimasukkannya mereka, penelitian berikutnya mengungkapkan bagaimana bias gender dalam pembangunan dan bersarangnya ideologi patriarkal dapat memperburuk serta mengurangi kerentanan khusus mereka. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bagaimana transfer teknologi menghambat atau menghilangkan pekerjaan kaum perempuan kelas pekerja, dan bagaimana modernisasi dan kebijakan dan praktik pembangunan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin mengubah lingkungan pedesaan dan jejaring sosial dan budaya asli, sering kali mereproduksi atau memperkuat *gender stereotype* dan ketidaksetaraan[18];[19].

Memeriksa beragam dimensi pekerjaan perempuan dan akses ke sumber daya alam sangat penting dalam mengungkap cara-cara di mana perempuan sebagian besar dirugikan oleh upaya dan kebijakan modernisasi. Persimpangan dari bentuk kekuasaan dan kontrol patriarkal dan adat dapat membatasi akses ke tanah, kredit, teknologi, dan pendidikan. Gerakan keadilan lingkungan dan penelitian feminis mengaitkan kemiskinan dan degradasi lingkungan seperti penggundulan hutan tropis, irigasi, dan keracunan pestisida dengan hubungan *gender* dalam kolonialisme dan kelangkaan yang disebabkan oleh perkembangan. Kerentanan rumah tangga, perubahan hak individu, rumah tangga,

---

[17] Bina Agarwal, "The Gender and Environment Debate: Lessons From India," *Feminist Studies* 18, no. 1 (1992): 122, https://doi.org/10.2307/3178217.

[18] Micaela di Leonardo, ed., *Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era*, 1991.

[19] Joni Seager, *Feminism, Politics and the Environment* (London: Routledge, 2019), https://doi.org/10.4324/9780429200007.

regional dan nasional, serta kurangnya demokrasi terkait dengan persistensi kemiskinan dan degradasi lingkungan.

Alternatif untuk pengarusutamaan pembangunan mengeksplorasi agroekologi adat dan pengetahuan ekologi, organisasi dan ketahanan gerakan sosial yang terkait dengan masalah lingkungan, dan memeriksa perjuangan dan perlawanan oleh perempuan dan oleh masyarakat yang terpinggirkan dan masyarakat adat. Ekofeminisme merupakan salah satu bentuk inklusi dari keterkaitan manusia dengan alam. Ekofeminisme menolak untuk menerima dualisme biner yang menghubungkan gender dan aktivitas dengan alam dengan menilai wanita dan/atau alam sebagai pihak yang inferior atau tidak setara[20].

Dalam mencapai tujuanya, gerakan ekofeminisme tentu memiliki metodenya sendiri. Buckingham[21] dalam tulisanya yang berjudul *Ecofeminism in the twenty-first century* menyebutkan setidaknya ada strategi utama yang saat ini dilakukan oleh gerakan ekofeminisme yaitu:

(1) Kebijakan, strategi ini dapat dilihat sejak akhir abad ke-20 dimana terdapat kecenderungan pemerintah untuk memberi perhatian lebih terhadap masalah kesetaraan gender[22]. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pengarusutamaan gender yang dimasukan dalam agenda HAM oleh PBB. Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (UNCED) pada tahun 1992 menjadi konferensi PBB pertama yang menerima banyak masukan dari pihak non pemerintah, yaitu *Planeta Famea*. Setelah itu, perempuan mulai mendapat pengakuan dalam berbagai kegiatan sebagai bentuk dari keterwakilan yang salah satu agendanya adalah pembangunan berkelanjutan.

(2) Protes untuk menyuarakan tujuanya. Rai[23] mengutarakan apabila masyarakat sipil (khususnya kelompok perempuan) merupakan elemen penting dalam memperkuat upaya pemerintah dalam menyelesaikan pengarusutamaan gender. Beberapa gerakan seperti Chipko Movement di India, Green Belt Movement di Kenya, hingga Akwesasne menjadi gambaran bagaimana turun ke lapangan menjadi sama pentingnya dengan merubah sistem melalui keterlibatan dalam pembuatan kebiajakan.

Dalam artikel ini, ekofeminisme digunakan untuk memberikan penjelasan bagaimana terdapat hubungan antara kerusakan alam usaha mencapai kesetaraan gender. Keterkaitan antara keduanya tidak hanya sebatas pada tataran simbolis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, namun karena pada praktiknya penebangan hutan berdampak lebih besar terhadap masyarakat adat perempuan. Oleh karenanya, ekofeminisme kemudian digunakan dalam skripsi ini sebagai alat untuk menjelaskan pola pergerakan yang dilakukan oleh AAS di Chattisgarh.

---

[20] Plumwood, *Feminism and the Mastery of Nature*, 20.

[21] Buckingham, *Ecofeminism*.

[22] Gambhir Bhatta, "Of Geese and Ganders: Mainstreaming Gender in the Context of Sustainable Human Development," *Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (March 1, 2001): 17, doi.org/10.1080/09589230130005053 7.

[23] Shirin Rai, *Institutional Mechanisms for the Advancement of Women* (New York: Routledge, 2007), https://doi.org/10.4324/9780203786680.

Konsep *Human Security*

Konsep human security pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1994. UNDP[24] mendefinisikan human security sebagai *'safety from such chronic threats as hunger, disease, and repression' as well as 'protection from sudden and harmful disruptions in the patterns of daily life'*. Definisi ini mencerminkan bahwa fokus kajian human security adalah keamanan manusia (individu dan masyarakat) dalam kehidupan sehari-hari[25]. Untuk mewujudkan human security, metode utama yang digunakan adalah perlindungan (*protection*) dan pemberdayaan (*empowerment*) terutama terhadap masyarakat atau individu yang berada dalam kondisi human[26].

Pada tahun 2016, *United Nations Trust Fund for Human Security* (UNTFS) mengeluarkan *Human Security Handbook* yang menjabarkan tujuh fokus *human* security. Pertama yaitu keamanan ekonomi *(economic security)*, yang berusaha mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan minimnya akses ke ekonomi. Kedua, keamanan pangan *(food security)* yang berusaha mengatasi kelaparan, akses terhadap makanan, dan kenaikan harga pangan. Ketiga, keamanan kesehatan *(health security)*, yang secara umum berusaha mengatasi epidemi, malnutrisi, system sanitasi yang buruk, serta akses terhadap fasilitas Kesehatan. Keempat, keamanan lingkungan *(environmental security)*, merupakan kategori yang berfokus untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan, berkurangnya sumber daya, dan bencana alam. Kelima, keamanan individu *(personal security)* yang berfokus mengatasi segala bentuk kekerasan fisik, perdagangan manusia dan pekerja anak. Keenam, keamanan komunitas *(community security)*, berfokus pada penyelesaian masalah antar etnis, agama dan masalah berbasis identitas lainya. Terakhir, keamanan politik *(political security)* yang berfokus pada resolusi masalah yang menyangkut politik seperti tekanan politik, hak asasi manusia, dan masalah lain yang berkaitan dengan hukum dan keadilan[27].

Meskipun human security memiliki banyak fokus, namun secara garis besar mereka memiliki memiliki tiga tujuan uta ma, yaitu *freedom from want*, *freedom from fear,* dan *freedom to live in dignity*. *Freedom from want* yaitu bebas dari kemiskinan, kekurangan, dan pengangguran sehingga individu mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka baik kebutuhan pangan maupun non pangan. *Freedom from fear* adalah bebas dari konflik dan kekerasan. Sementara itu *freedom to live in dignity* dapat diartikan sebagai kondisi di mana individu dapat hidup secara bermartabat, diakui eksistensinya, serta bebas dari pelanggaran hak asasi manusia.

Karena perbedaan kebutuhan dan parameter tentang hidup yang bermartabat dan bebas dari ancaman inilah kemudian yang membuat setiap masyarakat memiliki hal-hal yang berbeda yang harus dipenuhi untuk dapat terhindar dari *human insecurity.* Bagi masyarakat adat di India, hutan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan mereka. Hutan merupakan sumber kehidupan sehingga merebutnya berarti

---

[24] United Nations, "Human Development Report 1994," *Human Development Reports* (United Nations, January 1, 1994), 23, https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994.

[25] Nations, "Human Development Report 1994."

[26] Commission on Human Security, *Human Security Now* (The Commission, 2003), https://digitallibrary.un.org/record/503749.

[27] *Human Security Handbook* (Human Security Unit, 2016), 7.

merebut hidup masyarakat adat. Dalam tulisan ini penebangan hutan di Chattisgarh dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak bagi masyarakat adat dan menempatkan masyarakat adat pada posisi yang tidak diuntungkan. Oleh karena itu kegiatan penebangan hutan, kemudian dipercaya telah melanggar prinsip dasar human security khususnya keamanan pangan, kesehatan, lingkungan, dan individu.

Dalam tulisan ini, dampak negatif penebangan hutan yang dilakukan oleh FDC terhadap keamanan pangan, kesehatan, lingkungan, dan individu menjadi justifikasi bagi AAS untuk melakukan perlawanan terhadap penebangan hutan. Hal ini didukung dengan fakta apabila kerusakan hutan akan secara langsung maupun tidak akan mengganggu warga yang bergantung terhadapnya. Oleh karenanya penting bagi masyarakat atau setidaknya kelompok kepentingan untuk melakukan aksi atas apa yang terjadi di Chhattisgarh.

Konsep Gerakan Sosial

Gerakan sosial terdiri atas kelompok, organisasi, dan orang yang mengadvokasi dan mempromosikan suatu tujuan atau masalah secara kolektif. Dalam banyak kasus gerakan sosial berusaha menentang *status quo*, yang sering kali adalah pemerintah maupun kelompok-kelompok elit. Dalam mencapai tujuannya, sebuah gerakan sosial biasanya menggunakan pendekatan konfrontasi baik yang bersifat institusional maupun non-konvensional. Dalam beberapa dekade terakhir berbagai macam gerakan telah dipelajari: nasionalis, etnis, separatis, antikolonial, perdamaian, demokrasi, hak asasi manusia, lingkungan, minoritas etnis, hak sipil, hak-hak perempuan dan feminis, hak-hak binatang, buruh, petani, pelajar, untuk dan menentang aborsi, perangai, antirokok, kebangkitan agama, fundamentalis agama, dan sebagainya. Terdapat berbagai perubahan sosial, politik, dan budaya telah dihasilkan dari gerakan sosial, bahkan ketika mereka gagal dalam jangka pendek.

Teori gerakan sosial membedakan berbagai bentuk gerakan berdasarkan durasi, target, taktik, kekerasan, dan audiensnya. Perbedaan-perbedaan ini menghasilkan tiga kategori besar gerakan: gerakan kedaulatan wilayah yang menuntut otonomi daerah, separatisme, pemukiman diaspora, dan/atau pemisahan diri; protes yang menuntut perluasan hak-hak sipil dan ekonomi kelompok atau menuntut diakhirinya diskriminasi; serangan kolektif mulai dari genosida, pembersihan etnis, dan kekerasan massa, hingga ancaman simbolik. Studi pergerakan secara tradisional menganalisis bentuk-bentuk ini secara terpisah[28],[29]. Misalnya, kerusuhan ras dibedakan dari jenis konflik etnis lainnya dengan ekspresi kekerasan yang mungkin melibatkan ratusan atau ribuan orang dalam kegiatan yang berlangsung beberapa jam atau lebih[30],[31]. Protes untuk hak-hak sipil biasanya

[28] Mardi J. Horowitz and George F. Solomon, "A Prediction of Delayed Stress Response Syndromes in Vietnam Veterans," *Journal of Social Issues* 31, no. 4 (1975): 67–80, https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1975.tb01012.x.

[29] Michael Banton, *Racial and Ethnic Competition* (Cambridge University Press, 1983).

[30] Seymour Spilerman, "The Causes of Racial Disturbances: A Comparison of Alternative Explanations," *American Sociological Review* 35, no. 4 (1970): 627–49, https://doi.org/10.2307/2093941.

[31] Michael D. Myers, "Qualitative Research in Information Systems," *MIS Quarterly* 21, no. 2 (1997): 241–42, https://doi.org/10.2307/249422.

termasuk pawai, demonstrasi, aksi duduk, dan bentuk taktis serupa lainnya[32]. Sejauh gerakan-gerakan sosial berusaha untuk memberantas dan menggantikan batas-batas negara geografis dan administrasi yang ada, mereka memprovokasi kekerasan di pihak pemberontak dan otoritas negara. Hal ini terutama berlaku untuk gerakan separatis atau pemisahan diri yang menuntut penarikan formal dari otoritas politik pusat[33].

Lebih jauh lagi, dalam studi gerakan sosial baru, terdapat dua pandangan besar yaitu Mobilisasi Sumberdaya *(Resource Mobilization Theory)* dan Teori yang berorientasi pada Identitas (*Identity-Oriented Theory).* Keduanya memiliki perbedaan mendasar yang kemudian dapat menjawab berbagai fenomena Gerakan social yang bervariasi di seluruh dunia. Dalam tulisan ini, IOT akan digunakan karena dianggap lebih dapat menjelaskan fenomena yang dikaji.

Singh[34] berpendapat apabila *Identity-Oriented Theory* dalam gerakan sosial kontemporer *(contemporary social movements)* menjelaskan asumsi dasar sebagai kritik terhadap perspektif teori Mobilisasi Sumberdaya. Ia menambahkan apabila basis rasionalitas dari teori mobilisasi sumberdaya dianggap tidak cukup memadai dalam menjelaskan gerakan sosial baru. Teori mobilisasi sumberdaya dianggap gagal dalam menjelaskan beberapa ekspresi dari Gerakan sosial baru, seperti: gerakan feminis, gerakan lingkungan, gerakan damai, gerakan perlucutan senjata, dan gerakan kebebasan lokal[35].

Identity-Oriented Theory pada awalnya banyak ditemui di Eropa, sebagai oposisi atas penjelasan rasionalitas tentang gerakan sosial kontemporer yang umumnya dirumuskan dan dipraktekan oleh pakar di Amerika, khususnya eksplanasi yang digambarkan oleh teori Mobilisasi Sumberdaya. Dibandingkan dengan teori Mobilisasi Sumberdaya yang memfokuskan dan terikat secara signifikan dengan rasionalisme dan materialisme (*rationalism and materialism*), maka *Identity-Oriented Theory* secara umum mempunyai sifat-sifat non-materialistik dan ekspresif (*nonmaterialistic and expressive in nature*). *Identity-Oriented Theory* membahas pertanyaan-pertanyaan tentang integrasi dan solidaritas dari kelompok yang terlibat dalam aksi kolektif. *Identity-Oriented Theory* menolak usaha (dari teori Mobilisasi Sumberdaya) untuk memaksakan model rasionalitas dari neo-utilitarian dan voluntaristik dalam menjelaskan aksi kolektif dan gerakan sosial[36].

Para pendukung *Identity-Oriented Theory*, meskipun mereka menerima beberapa elemen repertoar dari teori Marxist seperti gagasan tentang perjuangan (*struggle*), mobilisasi (*mobilization*), kesadaran (*consciousness*), dan solidaritas (*solidarity*), namun mereka menolak gagasan yang bersifat reduksionisme dan deterministik materialisme dan konsep-konsep basis materialistik tentang formasi sosial. Determinisme Marxist, dan konsekuensi yang

---

[32] Doug McAdam, "Political Process Theory," in *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements* (John Wiley & Sons, Ltd, 2013), https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm160.

[33] Michael Hechter, "The Dynamics of Secession," *Acta Sociologica* 35, no. 4 (October 1, 1992): 267–83, https://doi.org/10.1177/000169939203500401.

[34] Jyotsna G. Singh, *Travel Knowledge*, 2001, https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-349-62233-7.

[35] A. Lynn Snow et al., "A Conceptual Model of Pain Assessment for Noncommunicative Persons with Dementia," *The Gerontologist* 44, no. 6 (December 2004): 807–17, https://doi.org/10.1093/geront/44.6.807.

[36] Snow et al.

menyangkut reduksionisme, saat ini mulai ditinggalkan karena redundansi teoritis mereka terkesan berlebih-lebihan. Formasi-formasi sosial baru (*new social formations*) dan Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*) seperti ekologi, feminisme, perdamaian dan mobilisasi akar rumput melampaui ide tentang kelas dan melewati batas kondisi material. Para partisipan GSB menegaskan bahwa tindakan diri mereka tidak dalam rangka mengusung nilai-nilai tenaga kerja (*labour values*) akan tetapi lebih mengusung nilai-nilai kemanusiaan secara luas (*whole human*)[37].

Dengan demikian, teori Identitas merupakan teori yang berorientasi post-Marxism. Post-Marxism sebagai cara (*mode*) berpikir kritis adalah merupakan logika tentang bentuk-bentuk sosial dari post-materialism, post-industrialism dan post-capitalism. Bentuk-bentuk sosial ini, merupakan sifat yang muncul dari refleksi kritis kontemporer dan aplikasi empirisme ekspresif sebagai metode dalam memahami konsepsi tentang *post-society, post-sociology dan New Social Movements*. Merupakan kesepakatan umum *Identity-Oriented Movements* dan tindakan kolektif (*collective actions*) adalah merupakan ekspresi tentang upaya penyelidikan tentang identitas (*identity*), otonomi (*autonomy*), dan pengakuan (*recognition*) manusia[38].

HASIL PENELITIAN

Menggunakan konsep *eco-feminism, human security* dan gerakan sosial, skripsi ini berargumen bahwa perlawanan AAS terhadap penebangan hutan di Chhattisgarh India dilakukan setidaknya melalui dua strategi utama. Pertama yaitu melalui advokasi dengan menunjukan bagaimana aksi penebangan hutan tersebut secara lingkungan, budaya dan ekonomi masih sangat dipertanyakan manfaatnya sehingga terdapat celah hukum yang dapat digunakan untuk menghentikanya. Kedua, melakukan protes dengan membangun dukungan masa dan mengumpulkan warga dari desa yang terdampak oleh penebangan hutan dalam sebuah forum. Forum tersebut kemudian digunakan sebagai sarana untuk menyatukan pendapat/suara dan mencapai kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan terhadap kasus penebangan hutan.

Perjuangan Berbasis Advokasi

Salah satu bentuk strategi ekofeminisme adalah perjuangan melalui kebijakan atau dapat dikatakan berbasis advokasi. Perjuangan yang seperti ini merupakan perjuangan yang bersifat *non-violence* atau tanpa kekerasan. Beberapa perjuangan AAS yang dapat dikatakan sebagai perjuangan berbasis advokasi antara lain:

a. Pencatatan Pelanggaran *Forest Development Corporations (FDC)*

Setelah dilakukan pertemuan awal pada 10 januari 2006, Adivasi Adhikar Samiti (AAS) kemudian memulai perlawananya dengan melakukan pencatatan terhadap pelanggaran pelanggaran yang telah dilakukan oleh FDC di Chhattisgarh India. Dalam melaksanakanya, AAS melakukan pengukuran luas wilayah hutan yang telah ditebang dan melakukan pencatatan terhadap penebangan pohon-pohon yang seharusnya masuk kedalam kategori pohon yang tidak boleh ditebang seperti pohon berbuah, pohon yang dikeramatkan, dan pohon yang terdapat darang burung di atasnya.

[37] Oman Sukmana, "Konvergensi Antara Resource Mobilization Theory Dan Identity Oriented Theory Dalam Studi Gerakan Sosial Baru," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (2013): 49.

[38] Sukmana, 49.

Selama proses pencatatan, AAS menemukan banyak pelanggaran terutama terkait dengan keberlanjutan (*sustainability).* Tewari[39] dalam tulisanya yang berjudul "*The effectiveness of state forest development corporations in India: an institutional analysis*" menyampaikan apabila secara umum FDC memiliki 'rapor merah' dalam pelaksanaanya. Ia menyampaikan apabila FDC memiliki kecenderungan untuk mengabaikan prinsip-prinsip *sustainability* guna memaksimalkan hasil yang hendak dicapai.

Nandi dan Garg[40] mengungkapkan apabila *Working Plan* yang dimiliki oleh FDC akan berdampak pada lingkunganm budaya, nutrisi, derta ekonomi warga sekitarnya. Beberapa di antaranya adalah:

1. FDC dalam melaksanakan operasinya telah menginterpretasikan aturan terkait jenis hutan secara salah. Peraturan di India menyatakan apabila are ayng dapat ditebang adalah area terbuka yang telah tidak subur, namun dalam kenyataanya FDC melakukan penebangan di area yang masih sangat rimbun dan termasuk kedalam hutan lebat.[41]
2. Rencana kerja mengatakan sekitar 30.000 orang suku di 72 desa akan terkena dampak langsung di Koriya; dan 100.000 orang di 200 desa jika kita memperhitungkan ketiga distrik tersebut (WP No. 676/2006, 4). Beberapa diantaranya adalah komunitas Baiga dan Pahadi Korwa, yang diidentifikasi sebagai kelompok suku yang sangat rentan (*Particularly Vulnerable Tribal Group/*PVTG), yang sudah menghadapi kemiskinan dan kelaparan kronis akibat perusakan mata pencaharian tradisional berbasis hutan.
3. Bersama dengan pohon sal, FDC berencana menebang pohon berbuah yang akan berdampak langsung pada makanan dan mata pencaharian masyarakat adat. Lebih dari 22.000 pohon termasuk ratusan pohon penghasil buah telah ditebang di 14 desa di Kabupaten Koriya, pada Mei 2006.
4. Penebangan tersebut juga akan menghancurkan habitat alami satwa liar yang ada. Setidaknya 27 spesies fauna di hutan yang dipilih.

Temuan-temuan yang didapatkan dari pencatatan langsung ke lapangan inilah yang digunakan oleh AAS untuk menjustifikasi aksinya di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan salah-satu strategi ekofeminisme yang mana mempertimbangkan jalur *non-violent* sebagai cara mereka mencapai agendanya.

b. Upaya Mendapatkan Dukungan dari Para Ahli

Pada tanggal 29 April 2006 lebih dari 3.000 perempuan dan 1.000 pria berkumpul di desa Tarabehra, blok Manendragarh untuk Audiensi Publik tentang masalah Penebangan Hutan. Mereka adalah perwakilan masyarakat adat dari desa-desa yang terkena dampak memberikan kesaksian mereka. Pejabat pemerintah meskipun diundang, tidak muncul. Sebuah panel independen yang terdiri dari ahli lingkungan dan hukum, bersama dengan perwakilan dan aktivis dari organisasi masyarakat adat dari seluruh Chhattisgarh, mendengarkan kesaksian dan menyatakan solidaritas atas perjuangan mereka. Orang-orang yang berkumpul pada *Public Hearing* tersebut kembali menegaskan tuntutan mereka untuk

[39] D. D. Tewari, "The Effectiveness of State Forest Development Corporations in India: An Institutional Analysis," *Forest Policy and Economics* 8, no. 3 (April 1, 2006): 279–300, https://doi.org/10.1016/j.forpol.2004.09.002.

[40] Nandi and Schneider, "Addressing the Social Determinants of Health," 394–95.

[41] "Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam (CRVVN)."

menghentikan penebangan. Masalah pembayaran tenaga kerja yang tertunda, dan perilaku kasar oleh polisi dan FDC juga dipresentasikan di hadapan panel. Majelis berjanji untuk menyelamatkan hutan mereka dengan segala cara[42].

Dalam pertemuan tersebut, para panelis juga berkesempatan untuk menulis kepada Mahkamah Agung tentang Hak atas Pangan, mendesak intervensi mereka atas hilangnya mata pencaharian dan kemungkinan kelaparan karena hilangnya hutan. Menanggapi permintaan mereka, Mahkamah Agung menulis kepada Pemerintah Chhattisgarh pada 3 Februari 2006, dengan subjek surat sebagai *'Impending starvation in Koriya, Sarguja and Kawardha districts due to large-scale felling of Sal trees and other NTFP bearing trees'*[43] meminta tinjauan segera atas proyek tersebut. Anggota Parlemen, yang bersimpati pada perjuangan tersebut, mengeluarkan pernyataan ke media cetak menentang penebangan tersebut.

c. Advokasi selanjutnya

Gerakan dan kemenangan melawan penebangan hutan oleh FDC di Chhattisgarh memperkuat AAS dan membangun pengetahuan dan kapasitasnya dalam menangani hak atas hutan. Oleh karena itu, pada Januari 2007, ketika Departemen Kehutanan Negara Bagian Chhattisgarh mulai melaksanakan Rencana Kerja sepuluh tahunnya di Koriya, yang melibatkan rencana penebangan pohon yang sama sekali terpisah di tiga blok (Manendragarh, Bharatpur, dan Sonhat), anggota AAS dengan cepat mengambil tindakan. Rencana ini difokuskan pada penebangan pohon sebagai bagian dari 'pengelolaan ilmiah' hutan untuk tujuan 'perbaikan hutan' yang secara teratur dilakukan oleh Departemen Kehutanan Chhattisgarh.

Gerakan tersebut menyebar ke wilayah sekitar, Sonhat, yang belum menjadi bagian dari perjuangan sebelumnya. Strategi serupa digunakan seperti pada perjuangan sebelumnya. Para pemimpin dari Manendragarh pergi ke daerah itu untuk melatih kaum Mitanin dan perempuan lainnya tentang prosedur untuk memeriksa dan mencatat daerah yang ditebang. Perempuan di Sonhat mengadopsi metode serupa, pertama-tama mencoba membujuk para pekerja untuk menghentikan penebangan, dan kemudian mengambil peralatan dari mereka jika mereka tidak berhenti. Departemen Kehutanan mengajukan sejumlah laporan polisi terhadap para pemimpin tersebut. Kali ini juga, majelis desa mengeluarkan resolusi untuk menentang penebangan tersebut. Namun, Komite Perlindungan Hutan (FPC) tidak setuju untuk menghentikan penebangan karena mereka akan menerima sebagian uang dari penjualan kayu yang ditebang. Organisasi menyelenggarakan acara publik di semua blok dan mempresentasikan laporan berdasarkan survei mereka terhadap area yang ditebang dan tuntutan mereka kepada Petugas Kehutanan Distrik (DFO). Para pemimpin membujuk DFO untuk mengunjungi beberapa desa bersama mereka dan mengamati pohon-pohon yang telah ditandai untuk ditebang. Ketika DFO mengunjungi beberapa desa, dia, bersama dengan para pemimpinnya, mengidentifikasi lebih dari 250 pohon yang salah ditandai untuk ditebang. DFO

[42] K Kohli, "Two Crore Trees and the Livelihood of Thousands Are at Stake," Infochangeindia, 2009, http://www.infochangeindia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5746:two-croretrees-and-the-livelihood-of-thousands-are-at-stake&catid=150&Itemid=38.

[43] N.C Saxena, "Impending Starvation in Koriya, Sarguja and Kawardha Districts Due to Large Scale Felling of Sal Trees and Other NTFP Bearing Trees," 2006.

menyadari kesalahan tersebut dan memerintahkan semua penebangan dihentikan sampai staf hutan telah dilatih dengan baik.

Serangkaian perjuangan lainnya terjadi kemudian pada tahun 2007. *Recognition of Forest Act* tahun 2006 atau Undang-Undang Hak Hutan, telah disahkan oleh Parlemen India. Hal tersebut merupakan momentum penting yang memberi hak kepada masyarakat adat di kawasan hutan untuk mendapatkan akta tanah yang memberikan pengakuan hukum hak atas tanah yang telah mereka huni dan garap secara turun-temurun. Syarat untuk menuntut hak adalah bahwa tanah tersebut harus menjadi milik keluarga sebelum 13 Desember 2005. Hal ini mendorong Dinas Kehutanan di Koriya untuk melakukan penanaman di atas tanah masyarakat adat secara paksa selama musim hujan (Juni – September) tahun 2007, untuk 'mengambil kembali' tanah sebelum masyarakat adat bisa mengajukan akta tanah.

Sejak itu, AAS telah mampu menggagalkan ancaman lain terhadap sumber daya alam. Pada tahun 2008, AAS berhasil menggagalkan ancaman kedua terhadap sumber daya alam di wilayahnya, berupa usulan pembangkit listrik. Pada tahun 2013, ancaman ketiga terhadap hutan ini muncul dalam bentuk proyek ekstraksi Coal-Bed-Methane. Para wanita khawatir ekstraksi metana akan menghabiskan sumber air tanah mereka, mencemari air minum, dan berdampak buruk pada hutan alam dan ekosistem. Dengan menggunakan strategi serupa seperti sebelumnya, mereka secara efektif menghentikan proyek selama tiga tahun. Namun, KLHK memberikan izin kepada perusahaan swasta pada tahun 2016 dan perjuangan masih berlanjut. Meskipun belum ada implementasi di lapangan, namun surat (tertanggal 15 April 2017) diterima oleh rekan penulis tepat pada saat pasal ini sedang disusun, yang menyatakan bahwa mereka akan segera memulai operasi.

Perjuangan Berbasis Protes

Selain melalui perjuangan berbasis advokasi, protes juga merupakan strategi ekofeminisme dalam mencapai tujuanya. Protes dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, beberapa yang dilakukan oleh AAS antara lain:

a. Membangun Dukungan Masa

Untuk mencapai tujuanya, AAS membangun dukungan massa, melakukan pertemuan di desa-desa yang terkena dampak, dan membangun konsensus di antara penduduk desa, termasuk anggota Panchayat dan anggota Komite Perlindungan Hutan (*Forest Protection Committee/*FPC) yang dibentuk oleh pemerintah sebagai bagian dari program pengelolaan hutan bersama regulernya. Strategi ini selaras dengan *identity-oriented social* movement yang mana mencoba mencari *common ground* dari orang-orang yang terdapkan untuk melakukan aksi. Selanjutnya, desa-desa yang terkena dampak mengeluarkan pernyataan sikap, dengan ribuan tanda tangan, menentang operasi penebangan[44]. FPC di sebagian besar desa yang terkena dampak mengeluarkan resolusi serupa. Hal ini tentu tidak mudah dilakukan, karena pejabat kehutanan memiliki kontrol atas FPC, karena merekalah yang membentuknya. Para pejabat juga mencoba memecah belah masyarakat dengan menjanjikan bahwa setiap FPC akan mendapatkan 10 persen bagian keuntungan setelah perkebunan jati yang direncanakan dapat ditebang dalam 15

[44] Sulakshana Nandi and Samir Garg, "Indigenous Women's Struggles to Oppose State-Sponsored Deforestation in Chhattisgarh, India," *Gender & Development* 25, no. 3 (September 2, 2017): 392, https://doi.org/10.1080/13552074.2017.1379781.

tahun, dan mencoba membujuk ketua FPC untuk menentang agitasi[45]. Namun, ketua FPC di sebagian besar desa tetap mengikuti pendapat masyarakat.

Pada bulan Maret 2006, AAS mengirim perwakilan ke Kementerian menuntut pencabutan Rencana Kerja dengan alasan kerusakan pada mata pencaharian dan lingkungan mereka. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan menyoroti pelanggaran oleh FDC di Chhattisgarh terhadap Kode Rencana Kerja Nasional dan Rencana Kerja saat ini. Namun[46] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di India tidak secara resmi mengakui telah menerima pengaduan dan tidak mengambil tindakan apa pun hingga kasus pengadilan memaksa mereka untuk campur tangan.

Melihat besarnya masa yang menolak kegiatan penebangan hutan ini, FDC di Chhattisgarh kemudian berjanji akan menunda kegiatan penebangan hutan di wilayah tersebut hingga dapat membuktikan keuntungan dari kegiatan penebangan hutan itu. Namun demikian, terlepas dari janjinya, kegiatan penebangan hutan tetap terjadi di berbagai wilayah.

b. Melakukan Aksi Langsung secara Kolektif

Di desa-desa di mana penebangan terus berlanjut meskipun petugas FDC telah diberitahu tentang keinginan masyarakat agar penebangan dihentikan, perempuan menyerbu lokasi penebangan dalam jumlah besar dan merampas peralatan penebangan dari para pekerja, sehingga menghentikan operasi. Setelah melakukan tindakan langsung dan menyita alat-alat dari para buruh, para perempuan tersebut akan melapor ke polisi untuk menginformasikan kejadian tersebut dan menyerahkan daftar alat-alat yang disita. Namun, dalam banyak kasus, polisi menolak memberikan tanda terima. Pertama-tama, pada 13 Januari 2006, ketika beberapa pemimpin dari Badkabehera pergi ke kantor polisi setempat di Kelhari, polisi menolak untuk mengambil pernyataan tertulis mereka[47].

Walaupun demikian, perempuan-perempuan tersebut kembali pada 16 Januari 2006, bersama dengan hampir 200 perempuan lain. Pemimpin wanita masuk ke dalam kantor polisi untuk berbicara dengan petugas yang bertanggung jawab, dan memberinya pernyataan tertulis yang mencantumkan alat-alat yang disita. Dia mengambil kertas itu tetapi tidak memberi mereka tanda terima, mengatakan bahwa dia akan mendapat masalah jika dia melakukannya. Setelah kejadian ini, polisi tidak mengganggu mereka lebih jauh, dan para wanita tersebut mengajukan pengaduan resmi terhadap petugas polisi yang telah mengancam mereka sebelumnya.

Namun, staf FDC terus mengancam perempuan tersebut kapan pun mereka bisa. Mereka juga secara teratur meminta intervensi dari polisi dan mengajukan pengaduan di berbagai kantor polisi terhadap ratusan Mitanin, pemimpin perempuan, dan anggota masyarakat lainnya. Melihat dukungan massa yang dimiliki AAS, dan konsensus masyarakat menentang penebangan tersebut, polisi tidak banyak campur tangan. Fase aksi ini terbukti sangat berbuah, dan FDC harus menghentikan operasi penebangannya di

[45] Nandi and Garg, 392.

[46] Samir Garg, "Grassroot Mobilisation for Children's Nutrition Rights," *Economic and Political Weekly* 41 (January 1, 2006): 3694–3700, https://doi.org/10.2307/4418620.

[47] Manish Chandra Mishra, "Two Lakh Trees and Water Security at Stake in Buxwaha's Bunder Diamond Mining Project," Mongabay-India, June 4, 2021, https://india.mongabay.com/2021/06/two-lakh-trees-and-water-security-at-stake-in-buxwahas-bunder-diamond-mining-project/.

Koriya. Setelah penebangan dihentikan, pada Februari 2006, FDCC berusaha mengangkut kayu yang sudah ditebang ke gudang mereka. Tetapi organisasi dan anggota masyarakat berkeras bahwa pohon-pohon ini adalah milik majelis desa, maka Gram Sabha harus diberi tanda terima tentang jumlah dan jenis pohon yang diangkut. Tanda terima diperlukan untuk mencatat jumlah pohon yang ditebang, setelah log diangkut. Para pemimpin terus mewaspadai kemungkinan pergerakan truk di area tempat terjadinya penebangan.

Contoh aksi kolektif lainnya terjadi di Badkabehera, di mana pada tanggal 15 Mei 2006, FDC memuat truk di tengah malam. Namun, para wanita, yang berjaga, menghentikannya untuk pergi. Sopirnya lari meninggalkan truk di hutan. Malam itu hampir 25 wanita tidur di bawah langit terbuka di hutan, melindungi truk yang dimuat. Di pagi hari, penulis dan petugas FDC, yang menurut mereka perempuan telah 'membajak' truk, pergi ke desa. Setelah diskusi panjang, petugas setuju untuk tidak mengangkut kayu gelondongan lagi, dan memberi perempuan tanda terima kayu yang telah mereka angkut sampai hari itu[48].

c. Aksi Perseorangan

Dalam beberapa kasus, anggota AAS mencegah pengangkutan kayu gelondongan seorang diri. Dalam satu contoh, Mitanin dari desa Larkoda menghentikan truk yang memuat barang dan meminta tanda terima kepada pengemudi. Ketika dia menolak, dia berbaring di jalan di depan truk dan menantangnya untuk menabraknya. Sopir itu turun dari truk dan kabur. Keesokan harinya, dia kembali bersama polisi, yang mengancam akan menangkap para wanita tersebut. Para wanita tersebut menyuruh mereka untuk terlebih dahulu mengirim seorang polisi wanita untuk menangkap mereka, karena ini adalah hukum. Mereka juga menyuruh mereka mengatur di penjara untuk anak-anak dan ternak mereka, yang harus mereka bawa[49].

Di desa-desa yang tidak secara langsung terkena dampak penebangan, para Mitanin dan pimpinan organisasi berkontribusi sebisa mungkin. FDC telah mulai mengembangkan daerah dekat desa Kelhari dan Manwari sebagai 'gudang kayu' mereka, untuk menyimpan kayu. Para wanita di desa-desa ini menggali parit di pintu masuk sehingga truk tidak bisa masuk ke dalam gudang. Mereka melakukan hal serupa sebanyak dua kali, setelah itu FDC menyerah untuk memperbaikinya. Dalam upaya untuk menciptakan perpecahan antara perempuan dan laki-laki, FDC menghentikan semua pembayaran tenaga kerja, dengan mengatakan bahwa pembayaran hanya akan dilakukan ketika kayu telah mencapai gudang. Setelah beberapa antagonisme awal, para buruh tidak mengganggu perempuan dan organisasi membantu mereka untuk mengajukan aplikasi kepada pemerintah untuk menuntut upah mereka.

KESIMPULAN

Penebangan hutan yang dilakukan oleh Forest Development Corporations (FDC) di Chhattisgarh, telah menciptakan fenomena sosial yang tidak pernah ditemui sebelumnya. Mitanin, organisasi perempuan yang berbasis komunitas yang pada mulanya memiliki tugas utama untuk menjaga kesehatan masyarakat berubah menjadi Adhivasi

[48] Nandi and Garg, "Indigenous Women's Struggles to Oppose State-Sponsored Deforestation in Chhattisgarh, India," 393.

[49] C R Bijoy, "Forest Rights Strugglethe Adivasis Now Await A Settlement," *American Behavioral Scientist - AMER BEHAV SCI* 51 (August 1, 2008): 1761, Https://Doi.Org/10.1177/0002764208318929.

Adikar Samithi, organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat terhadap hutan.

Perlawanan Adhivasi Adikar Samithi terhadap penebangan hutan di Chhattisgarh India dilakukan setidaknya melalui dua strategi utama. Pertama yaitu melalui advokasi dengan menunjukan bagaimana aksi penebangan hutan tersebut secara lingkungan, budaya dan ekonomi masih sangat dipertanyakan manfaatnya sehingga terdapat celah hukum yang dapat digunakan untuk menghentikanya. Kedua, melakukan protes dengan membangun dukungan masa dan mengumpulkan warga dari desa yang terdampak oleh penebangan hutan dalam sebuah forum. Forum tersebut kemudian digunakan sebagai sarana untuk menyatukan pendapat/suara dan mencapai kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan terhadap kasus penebangan hutan.

Bibliography

Agarwal, Bina. "The Gender and Environment Debate: Lessons From India." *Feminist Studies* 18, no. 1 (1992): 119. https://doi.org/10.2307/3178217.

Banton, Michael. *Racial and Ethnic Competition*. Cambridge University Press, 1983.

Bhatta, Gambhir. "Of Geese and Ganders: Mainstreaming Gender in the Context of Sustainable Human Development." *Journal of Gender Studies* 10, no. 1 (March 1, 2001): 17–32. https://doi.org/10.1080/09589230130005053 7.

Bijoy, C R. "Forest Rights StruggleThe Adivasis Now Await a Settlement." *American Behavioral Scientist - AMER BEHAV SCI* 51 (August 1, 2008): 1755–73. https://doi.org/10.1177/0002764208318929.

Buckingham, Susan. *Ecofeminism*. Amsterdam: Elsevier, 2015.

"Chhattisgarh Rajya Van Vikas Nigam (CRVVN)," 2004. http://planningcommission.nic.in/data/datatable/data_2312/comp_data2312.pdf.

Deshpande. "The Problem of Culture," 2004. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/000944550404000208.

"Directorate of Economics & Statistics Chhattisgarh," 5AD. http://www.mahaforest.gov.in/managementpdf/1441448415VOLUME%20-I.pdf.

"Forest Survey of India (FSI)," 2011. http://fsi.nic.in/cover_2011/chattisgarh.pdf.

Garg, Samir. "Grassroot Mobilisation for Children's Nutrition Rights." *Economic and Political Weekly* 41 (January 1, 2006): 3694–3700. https://doi.org/10.2307/4418620.

Hechter, Michael. "The Dynamics of Secession." *Acta Sociologica* 35, no. 4 (October 1, 1992): 267–83. https://doi.org/10.1177/000169939203500401.

"High Level Committee on Socio-Economic, Health and Educational Status of Tribal Communities of India (HLC)," 2014. https://ruralindiaonline.org/resources/report-of-the-high-level-committee-on-socio-economichealth-and-educational-status-of-the-tribals-of-india/.

Horowitz, Mardi J., and George F. Solomon. "A Prediction of Delayed Stress Response Syndromes in Vietnam Veterans." *Journal of Social Issues* 31, no. 4 (1975): 67–80. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1975.tb01012.x.

Human Security Handbook. Human Security Unit, 2016.

"Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE)," 2010. http://www.icfre.org/FSRI-REPORT_English.pdf.

Kohli, K. "Two Crore Trees and the Livelihood of Thousands Are at Stake." Infochangeindia, 2009.

http://www.infochangeindia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5746:two-croretrees-and-the-livelihood-of-thousands-are-at-stake&catid=150&Itemid=38.

Kolodny, Annette. *The Land Before Her*. United States, 1984.

Leonardo, Micaela di, ed. *Gender at the Crossroads of Knowledge: Feminist Anthropology in the Postmodern Era*, 1991.

McAdam, Doug. "Political Process Theory." In *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. John Wiley & Sons, Ltd, 2013. https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm160.

Merchant, Carolyn. *The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution*. San Francisco: Harper & Row, 1980.

"Ministry of Tribe Affairs (MoTA)," 2017. https://tribal.nic.in/declarationof5thSchedule.aspx.

Mishra, Manish Chandra. "Two Lakh Trees and Water Security at Stake in Buxwaha's Bunder Diamond Mining Project." Mongabay-India, June 4, 2021. https://india.mongabay.com/2021/06/two-lakh-trees-and-water-security-at-stake-in-buxwahas-bunder-diamond-mining-project/.

Myers, Michael D. "Qualitative Research in Information Systems." *MIS Quarterly* 21, no. 2 (1997): 241–42. https://doi.org/10.2307/249422.

Nandi, Sulakshana, and Samir Garg. "Indigenous Women's Struggles to Oppose State-Sponsored Deforestation in Chhattisgarh, India." *Gender & Development* 25, no. 3 (September 2, 2017): 387–403. https://doi.org/10.1080/13552074.2017.1379781.

Nandi, Sulakshana, and Helen Schneider. "Addressing the Social Determinants of Health: A Case Study from the Mitanin (Community Health Worker) Programme in India." *Health Policy and Planning* 29, no. suppl_2 (September 1, 2014): ii71–81. https://doi.org/10.1093/heapol/czu074.

Nations, United. "Human Development Report 1994." *Human Development Reports*. United Nations, January 1, 1994. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-1994.

Plumwood, Val. *Feminism and the Mastery of Nature*. Australia: Routledge, 1994. https://www.routledge.com/Feminism-and-the-Mastery-of-Nature/Plumwood/p/book/9780415068109.

Rai, Shirin. *Institutional Mechanisms for the Advancement of Women*. New York: Routledge, 2007. https://doi.org/10.4324/9780203786680.

Rocheleau, Dianne, Barbara Thomas Slayter, and Esther Wangari. *Feminist Political Ecology: Global Issues and Local Experience*. London: Routledge, 1996.

Saxena, N.C. "Impending Starvation in Koriya, Sarguja and Kawardha Districts Due to Large Scale Felling of Sal Trees and Other NTFP Bearing Trees," 2006.

Seager, Joni. *Feminism, Politics and the Environment*. London: Routledge, 2019. https://doi.org/10.4324/9780429200007.

Security, Commission on Human. *Human Security Now*. The Commission, 2003. https://digitallibrary.un.org/record/503749.

Singh, Jyotsna G. *Travel Knowledge*, 2001. https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-349-62233-7.

Snow, A. Lynn, Kimberly J. O'malley, Marisue Cody, Mark E. Kunik, Carol M. Ashton, Cornelia Beck, Eduardo Bruera, and Diane Novy. "A Conceptual Model of Pain

Assessment for Noncommunicative Persons with Dementia." *The Gerontologist* 44, no. 6 (December 2004): 807–17. https://doi.org/10.1093/geront/44.6.807.

Spilerman, Seymour. "The Causes of Racial Disturbances: A Comparison of Alternative Explanations." *American Sociological Review* 35, no. 4 (1970): 627–49. https://doi.org/10.2307/2093941.

Sukmana, Oman. "Konvergensi Antara Resource Mobilization Theory Dan Identity Oriented Theory Dalam Studi Gerakan Sosial Baru." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 8, no. 1 (2013): 39–62.

Tewari, D. D. "The Effectiveness of State Forest Development Corporations in India: An Institutional Analysis." *Forest Policy and Economics* 8, no. 3 (April 1, 2006): 279–300. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2004.09.002.